

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyandang status janda atau belum menikah bukanlah hal yang diinginkan setiap perempuan. Namun, keadaan lah yang mengharuskan mereka melewati takdir tersebut. Dalam menjalani kehidupannya mereka membutuhkan kemandirian terutama dalam menghidupi diri dan keluarganya. Status tersebut memberikan beban tersendiri dan sekaligus juga menjadi tantangan bagi mereka. Tidak banyak dari mereka yang berputus asa dan tidak bisa menerima keadaan tersebut. Patut kita hargai, karena masih ada perempuan yang masih memiliki semangat untuk bisa mempertahankan diri dan menjadi pribadi yang lebih berdaya.

Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitupun dengan perempuan. Biasanya seorang perempuan memiliki kelebihan dibidang mengatur keuangan. Hal ini yang menjadikan mereka bisa bertahan dalam keadaan tertentu. Ketika keadaan yang mengharuskan mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarganya. Mereka memilih untuk memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka. Ada dari mereka yang memilih berbisnis, baik itu makanan, kerajinan, atau pakaian. Ada pula yang memilih bekerja di tempat tertentu seperti di kantor, atau di pabrik. Itulah contoh dari cara perempuan dalam mempertahankan kehidupannya dari kondisi yang mereka hadapi terutama dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Sebagai *single parent* (janda) sudah menjadi kenyataan bahwa kewajiban dalam mencari nafkah sudah berpindah ke tangannya sejak suaminya pergi baik itu meninggal atau pun bercerai. Berubah status menjadi kepala keluarga tentunya mereka harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa meneruskan kehidupan. Banyak dari mereka memilih untuk berdagang kecil-kecilan seperti menjual makanan keliling kampungnya. Atau menjual barang-barang seperti kerudung, atau pakaian perempuan. Ada pula yang ahli di bidang kerajinan, namun terkadang perempuan yang melakukan hal tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memasarkannya. Hal inilah yang perlu diperhatikan, karena mereka membutuhkan bimbingan agar mereka bisa mengasah potensi mereka masing-masing dan tentunya mereka bisa menjadikan potensi mereka sebagai jalan keluar untuk meningkatkan ekonomi keluarganya.

Pemberdayaan perempuan dalam kondisi seperti ini sangatlah diperlukan. Agar perempuan yang mengalami kondisi seperti itu, tidak terpuruk dan putus asa. Diperlukannya kegiatan-kegiatan yang menggali potensi mereka dan mengarahkannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang nantinya menjadi modal mereka dalam menghadapi kehidupannya.

Pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks keluarga sangat penting. Kaum perempuan memiliki potensi untuk berkembang. Kaum perempuan juga memiliki banyak potensi yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Maka ketika potensi itu disatukan, akan menghaikan energi untuk keluar dari kemiskinan,

meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan pada akhirnya kesejahteraan keluarga dapat diraih. (Anwas, 2014, hal. 149)

Berdasarkan informasi yang didapat dari artikel di internet, pada akhir tahun 2000 ada satu program di Aceh yang dikhususkan untuk membantu kehidupan kaum perempuan yang menyandang status janda, program tersebut adalah PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Program ini digagas sebagai bentuk respon KOMNAS (Komisi Nasional) Perempuan terhadap permintaan para janda yang menjadi korban konflik di Aceh untuk memperoleh sumber daya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi.

Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan bekerja atau berbisnis memang diperbolehkan. Karena dalam sebuah keluarga adanya tolong menolong dalam mencari nafkah seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut ini.

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw, berkata kepada Zainab Istri Abdullah bin Mas’ud: suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak menerima sedekahmu”. (HR. Bukhari) (Syuqqah, 1995, hal. 139)

Seiring berjalannya waktu program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) ini menjadi program semakin berkembang dan menjadi program pemerintah di setiap provinsi salah satunya Jawa Barat. Awalnya sasaran dari program pemberdayaan ini adalah perempuan yang berstatus janda, namun seiring banyaknya konflik lalu program ini juga diperuntukan untuk perempuan yang menjadi seorang istri namun suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya

dan remaja perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam kasus seperti ini pemerintah membuat program pemberdayaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah meluncurkan program pemberdayaan salah satunya adalah melalui pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Program-program tersebut diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan namun juga untuk memberikan efek yang baik dalam pembangunan.

Salah satu program pemerintah tersebut adalah program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Program ini bertujuan agar perempuan kepala keluarga dapat berdaya, yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3APM).

Program PEKKA yang ada di Kota Sukabumi sudah berjalan mulai dari tahun 2010. Data terakhir pada tahun 2018, ada 18 kelompok PEKKA yang ada di Kota Sukabumi yang terdiri dari jumlah seluruh anggota mencapai 215 anggota. Tentunya kelompok ini ada di setiap kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Semua kelompok PEKKA tersebut di bina oleh satu pendamping lapangan yang bertugas. (Hasil survei analisis, 31 Desember 2018)

Untuk menjadi anggota dalam kelompok PEKKA tersebut ada empat indikator. Yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut sudah tidak mempunyai suami, baik itu janda yang ditinggal mati ataupun janda yang disebabkan karena perceraian.
2. Perempuan yang bersuami, namun suami tidak mampu memberi nafkah dikarenakan mengalami cacat permanen.
3. Perempuan yang bersuami dan bekerja, namun belum bisa memenuhi kebutuhan primer keluarganya.
4. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Biasanya remaja yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terbentur biaya dan keadaan yang mendesak.

Kegiatan dari program ini berupa pelatihan *soft skill* dan adanya bantuan berupa modal fisik. Pelatihan tersebut dilakukan oleh P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera) di setiap kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun hanya untuk satu kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan dibantu oleh Dinas Sosial dan DISKOPDAGRIN (Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri).

Program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) sesuai dalam UUD 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya penganut prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan dalam segala bidang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, dilanjutkan pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas kerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Sikap pemerintah seperti itu juga tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, dimana dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara perempuan sebagai peserta, pengambilan keputusan dan penikmat di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki perlu adanya kerjasama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian. (Onny S, 1996, hal. 196)

Memang pada hakikatnya, laki-laki lah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Seperti firman Allah yang ada dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 dikatakan bahwa “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan”, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (Laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa disitulah letak sebab pengangkatan pemimpin. Secara alami laki-laki harus bekerja di luar rumah untuk menari rezeki, mengorganisasikan urusan belanja untuk keluarganya agar mereka merasa nyaman hidup di rumah, tanpa pemborosan dan berlebih-lebihan. Sedangkan wanita, secara alami memikul tugas untuk berusaha membahagiakan suaminya, mengatur rumahnya, mendidik anak-anak di dalam rumah. Dan yang jelas, laki-laki lah yang harus mencari nafkah. Dengan segala kelebihan dan kemampuannya, suami dapat mengambil keputusan yang benar, dan dia juga

dibekali strategi pengendalian yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan. Maka dari itu, pemilihan suami sebagai kepala rumah tangga adalah keistimewaan yang dibawanya sejak lahir. (Al Shabbagh, 1994:131)

Keluarga dianggap sebagai suatu sistem sosial, karena memiliki unsur-unsur sosial yang pada pokoknya mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas. Dalam salah satu fungsi keluarga yaitu keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan ekonomi.. (Soekanto, 1992, hal. 2)

Dalam sebuah keluarga identik dengan adanya seorang ayah ibu dan anak-anaknya. Dalam kenyataannya suami diasumsikan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, sehingga hanya tenaga kerja laki-laki yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. (Zubeidi, 2003 , hal. 40)

Adapun keluarnya seorang wanita untuk bekerja, maka hal itu tidaklah mengapa, selama pekerjaan tersebut untuk kebutuhan mendesak, seperti tidak adanya orang yang menanggung kebutuhan hidup dia dan anak-anaknya. Selama pekerjaan tersebut tidak melanggar larangan yang sesuai dengan syariat Islam dan juga selalu berpegang teguh pada tata krama Islam. (Syarif, 1997, hal. 8)

Konsep kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mengandung makna tidak ada pihak yang menguasai dan dikuasai, tidak ada pihak yang mengeksploitasi dan dieksploitasi, akan tetapi mengandung arti kaum perempuan dan laki-laki saling memberdayakan sehingga mengakibatkan adanya

komunikasi. Sebaliknya, jika ada satu pihak yang ingin menguasai maka akan terjadi perdebatan antar keduanya karena terdapat kecenderungan usaha untuk menang. Pada hakekatnya antar perempuan dan laki-laki saling membutuhkan dalam mencapai tujuan bersama yang memang tidak bisa dilakukan sendiri. (Risyanti, 2006, hal. 112)

Upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat, perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktural. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam konstelasi perekonomian nasional. (Machendrawaty, 2001, hal. 70)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Melalui PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”** (Studi Deskriptif di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3APM).

1.2 Fokus Penelitian

Untuk lebih memperjelas masalah yang akan dibahas maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi adanya program pemberdayaan perempuan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk KBP3APM Kota Sukabumi kepada anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)?

2. Bagaimana pelaksanaan Program pemberdayaan perempuan kepada anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di kota Sukabumi dalam meningkatkan ekonomi keluarga?
3. Bagaimana hasil dari program pemberdayaan perempuan terhadap anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam meningkatkan ekonomi keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan sebelumnya, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui apa latar belakang adanya program pemberdayaan perempuan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk KBP3APM Kota Sukabumi kepada anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)
2. Mengetahui pelaksanaan Program pemberdayaan perempuan kepada anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di kota Sukabumi dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
3. Mengetahui hasil dari program pemberdayaan perempuan terhadap anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sebagai sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah dalam khasanah keilmuan, sebagai tambahan informasi bagi masyarakat untuk keberhasilan berwirausaha dalam pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah, dari hasil penelitian ini dapat diketahui manajemen pemberdayaan rangka pemberdayaan perempuan, khususnya masyarakat sekitar yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan tahap pembelajaran mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah pada realita sosio-ekonomi di masyarakat.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

- a) Skripsi yang hampir sama dengan penulis teliti yaitu skripsi yang disusun oleh: **Nika Rizqi Fitriana** dari Universitas Negeri Semarang, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui industri kecil di pedesaan*”. Menurut **Nika Rizqi Fitriana** “Anggota perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh, serta memiliki penghasilan rutin setiap bulannya untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Menurut analisis longwe program pemberdayaan hanya pada level akses dan kesejahteraan. Berdasarkan konsep partisipasi, partisipasi hanya sebagai cara program tersebut hanya pada tahap menuju pemberdayaan karena perempuan hanya sebagai objek.

- b) Skripsi yang hampir sama dengan penulis teliti yaitu skripsi yang disusun oleh: **Supriati** dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “ *Peranan Pemberdayaan Perempuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Indah Lestari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*”. Menurut **Supriati** “Program tersebut bertujuan untuk menambah semangat dan pengetahuan setiap ibu rumah tangga yang tertarik dengan kegiatan pertanian yang diarahkan pada pemanfaatan lahan guna terciptanya ketahanan dan kemandirian. Lalu dengan adanya pelatihan dan penyuluhan yang berupaya untuk pemberdayaan ekonomi membantu anggota memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan dapur selain itu membantu para ibu lebih berpengaruh dalam ranah politik”.
- c) Skripsi yang hampir sama dengan penulis teliti yaitu skripsi yang disusun oleh: **Agung Saritjo** dari Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, dengan judul “ *Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Petani Kecil (KPK) Ngudi Lestari di Mendogan*”.

Bandung Playen Gunung Kidul Yogyakarta”. Menurut **Agung Saritjo** “ Tujuan pemberdayaan perempuan di KPK Ngudi Lestari adalah untuk membantu meningkatkan keterampilan anggota kelompok sehingga dapat melihat peluang yang ada, agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang cukup melimpah di daerah tersebut dengan mengolah hasil pertanian menjadi berbagai macam olahan, sehingga dapat menambah penghasilan dan meningkatkan ekonomi keluarga”.

1.5.2 Landasan Teoritis

Menurut Parsons (1994:49), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Slamet (2003:49), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Menurut Pranarka dan Muljarto (1996:50), pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum pendidikan, dan lain sebagainya.

Selama ini pemberdayaan merupakan *the missing ingredient* dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber daya yang penting. (Nasdian, 2014:91)

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan, kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Teori mula tentang pembangunan ditandai oleh kenyataan bahwasanya konsep pembangunan dianggap sama dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Sejarah pemikiran ekonomi dapat diidentifikasi dalam tiga tahapan yang berbeda, yaitu: klasikal (*economic development* menurut: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthu; atau yang pada masa modern ialah setara

dengan perspektif antar disiplin ilmu), neo-klasikal (seperti dalam diskusi teori pembangunan akibat penambahan produktifitas; berkaitan dengan pembagian kerja dan ukuran pasar, distribusi produksi bagi berbagai lapisan masyarakat, dan bagaimana distribusi itu berlaku terhadap pembangunan ekonomi serta *keynesian*.

Menurut Midgley (1995:42) pembangunan yang dilaksanakan di seluruh dunia memang selalu menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuannya. Namun pembangunan tersebut sering mengalami distorsi dari hakikat dasar pembangunan yang ingin mewujudkan kesejahteraan manusia. Midgley percaya bahwa pembangunan yang berorientasi ekonomi harus dilengkapi dengan keberpihakan pada sisi sosial kemanusiaan, dan ia menamakan konsep tersebut dengan istilah pembangunan sosial (*social development*). Pembangunan sosial ini perlu dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, masyarakat, dan individu.

Pada tahun 2000 kepala negara dari seluruh dunia atas studi dan kesimpulan PBB sepakat untuk mengarahkan dan mengukur pembangunan berbasis manusia dan masyarakat itu dalam suatu paket yang disebut dengan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Ada delapan kesepakatan, yaitu:

- a) Pengurangan kemiskinan dan kelaparan
- b) Pencapaian pendidikan dasar umum
- c) Mempromosikan persamaan gender dan lebih memperkuat kaum perempuan

- d) Mengurangi angka kematian anak
- e) Meningkatkan kesehatan ibu hamil
- f) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
- g) Memastikan kelangsungan lingkungan, hidup
- h) Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan.

Pembangunan manusia sebagai titik sentral menurut Suryono (2009:43) yaitu menjadikan penduduk yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berumur panjang, cerdas, terampil, mempunyai kesetaraan gender yang seimbang, mampu dan memiliki pekerjaan yang mendapatkan penghasilan.

Islam memandang perempuan dari sudut pandang keimanan sebagai individu anggota umat yang dikaitkan dengan individu yang lain dengan kaitan akidah. Yang dimaksudkan dengan ikatan akidah yaitu membentuk gerakan sebagai motor penggerak aktivitas umat dengan tujuan mewujudkan syariat yang menjadi hukum umat. (Izzat, 1997, hal. 78)

Dalam Islam, perempuan dan laki-laki diciptakan bukan sebagai musuh atau lawan, tetapi sebagai bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang disebut dengan pengurangan hak perempuan atau penzaliman kepada perempuan demi kepentingan laki-laki. Justru, syariat yang diturunkan bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah Swt. (Aminah, 2010, hal. 14)

Perempuan masih identik dengan urusan “Dapur, sumur dan kasur”. Pekerjaan perempuan terbatas pada mengurus rumah tangga seperti memasak

di dapur, mencuci, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Masih terbatasnya peran perempuan tersebut menurut Suryono (2010) terkait dengan kemiskinan dalam keluarga-keluarga di Indonesia. Realitas keluarga miskin biasanya penghasilan bersumber dari mengandalkan suami saja. Seharusnya untuk mendongkrak keterpurukan keluarga seperti itu sangat perlu peran serta perempuan. Para istri dari keluarga miskin perlu diberdayakan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga.

Perempuan boleh bekerja dan berkarir dalam berbagai bidang, asal dilakukan dengan cara yang baik, benar, dan halal, sesuai ketentuan syariat. Seorang perempuan diperbolehkan bekerja dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Jika ia seorang janda. Baik janda secara substansi maupun secara status diperbolehkan bekerja untuk menjaga jati dirinya dan mencegah perbuatan mengemis dan berutang.
2. Seorang istri yang membantu suaminya dan tentunya diberikan izin oleh suami. Dalam hal ini istri berperan sebagai mitra kerjasama secara ekonomi.
3. Seorang perempuan yang membantu keluarga. Ketika seseorang memerlukan bantuan, maka yang wajib menolongnya adalah keluarga terdekatnya.

Sebagaimana firman Allah Swt :

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai disana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya). Musa berkata “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua wanita itu menjawab “Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umrnya.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja unruk orangtuanya merupakan salah satu bentuk ibadah. Pada intinya, perempuan boleh bekerja. Namun, ada beberapa hal yang akan menjadikannya haram .

Pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat perjuangan tersebut, yaitu perjuangan perempuan. (Risyan, 2006, hal. 111)

Keluarga merupakan bentuk masyarakat pertama. Sampai kini keluarga tetap merupakan kesatuan kesatuan atau unit masyarakat yang terkecil. Anggota-anggota keluarga hidup dan bekerja sama dalam kelompok yang membentuk rumah tangga, dan terjaring suatu cara hidup. Dalam bentuk yang paling sederhana terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hidup dalam suatu ikatan perkawinan beserta anak-anaknya. (Gazalba, 1979, hal. 184)

Keluarga adalah suatu bangunan tersendiri dalam struktur sosial. Kesuksesan dan efisiensi dari tatanan sosial berapapun besarnya bergantung pada stabilitas keluarga dan harmonisasi internal rumah tangga. Padahal semua orang tahu bahwa stabilitas dan harmonisasi keluarga itu sangat bergantung pada kebaikan setiap anggota keluarga dalam memenuhi kewajibannya terhadap anggota keluarga lainnya. (Summa, 2005, hal. 34)

Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya. Para anggota keluarga bekerja sama sebagai tim untuk menghasilkan sesuatu. (Horton & L.Hunt, 1984:278)

Keluarga adalah jamaah Muslim yang dimulai anggotanya dari dua orang. Kemudian bertambah banyak dengan lahirnya anak-anak sesuai dengan kehendak Allah swt. (Mahmud, 1994, hal. 130)

Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga” Status berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris toteles : “Bahwa di dalam

tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”.

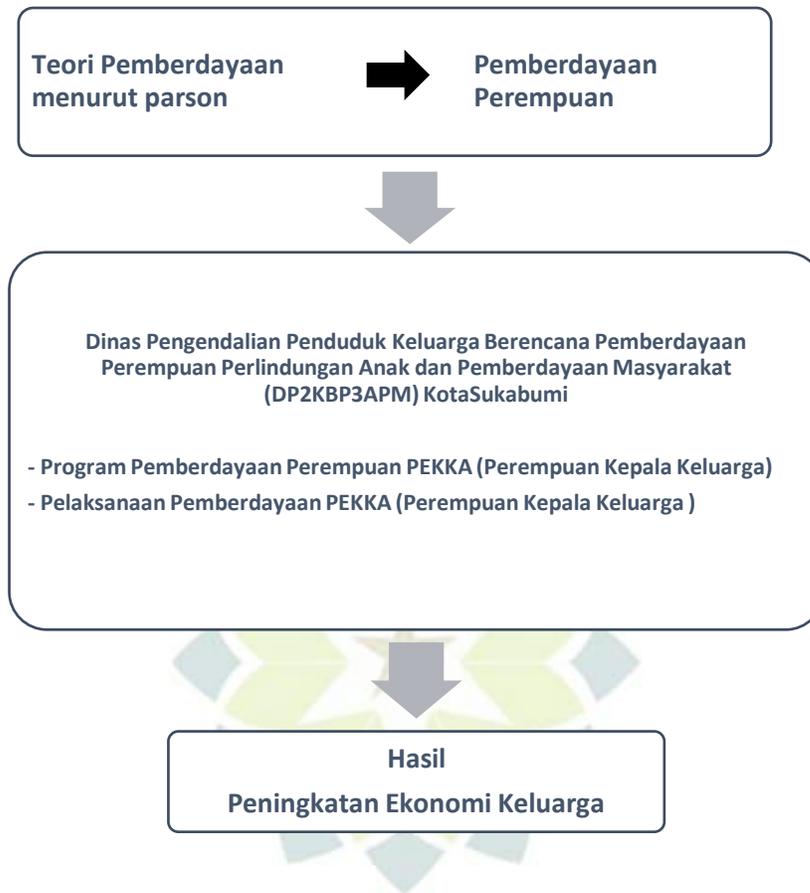
Menurut T.Gilarso (2002:63) “Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi “. Secara Konkritnya, pendapatan keluarga berasal dari:

1. Usaha itu sendiri : misalnya berdagang, bertani, membuka usaha sebagai wiraswastawan,
2. Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan,
3. Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain. Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.

Berkaitan dengan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem.

1.5.3 Kerangka Konseptual

Tabel 1. Kerangka Konseptual



1.6 Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini disebut juga dengan istilah metodologi penelitian atau prosedur penelitian. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018: 15) Langkah-langkah penelitian merupakan suatu prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam suatu karya ilmiah, dan data yang dikumpulkan itu tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Uraian pada bagian ini terdiri atas:

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pengendalian Penduduk KBP3APM Kota Sukabumi. Alasan pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian diantaranya *pertama*, adanya masalah dan fenomena yang memungkinkan untuk diteliti serta tersedianya sumber data-data yang di perlukan, *kedua*, jarak yang berdekatan dengan lokasi tempat tinggal penulis sehingga memudahkan untuk pencarian data.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik (utuh), kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma ini disebut paradigma postpositivisme, karena dalam memandang gejala, lebih bersifat unggul, statis, dan konkret. (Kuswana, 2011, hal. 43)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. (Kuswana, 2011, hal. 44-45)

1.6.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan penelitian secara deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan apa adanya, yaitu tanpa ditambah dan dikurangi. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian. (Kuswana, 2011, hal. 37)

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menguji hipotesa atau menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1.6.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, yaitu data yang sebenarnya terjadi, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap. Untuk mendapatkan data yang pasti, diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Oleh karena

itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. (Kuswana, 2011, hal. 44)

1.6.4.2 Sumber Data

1.6.4.2.1 Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pekerja lapangan yaitu Ibu Reni . Serta beberapa Kader yang terlibat dalam Program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) ini.

1.6.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa data kepustakaan atau teori serta dokumen-dokumen mengenai program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) serta sumber data dari beberapa kegiatan anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

1.6.5 Penentuan Informan atau Unit Penelitian

1.6.5.1 Informan dan Unit Analisis

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Pekerja Lapangan yang bertugas yaitu Ibu Reni yang mengetahui mengenai seluk beluk terselenggaranya program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) tersebut.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

1.6.6.1 Metode Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai *eksplorasi*. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

Dalam Observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya. (Nasution, 2011, hal. 106)

1.6.6.2 Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. (Nasution, 2011: 113) Wawancara juga merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu

pembantu utama dalam metode observasi. (Koentjaraningrat, 1997, hal. 129)

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait seperti kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, pekerja lapangan dan anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) yang terlibat.

1.6.6.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dalam hal ini penulis akan melaksanakan studi dokumentasi kepada beberapa dokumen, salah satunya yaitu dokumen mengenai data di dinas Dinas Pengendalian Penduduk KBP3APM.

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi atau pengumpulan dan analisis data terhadap beberapa informan yang terkait dan memeriksa secara langsung terhadap aktivitas kegiatan yang diselenggarakan.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian yang penulis laksanakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan beberapa teknik atau langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut:

1.6.8.1 Pengumpulan Data

Data penelitian yang akan dilakukan melalui proses analisis data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi akan dikumpulkan serta dikemas selengkap-lengkapnyanya tanpa adanya pengurangan maupun penambahan.

1.6.8.2 Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan penyeleksian untuk memperoleh kesimpulan pada akhir data.

1.6.8.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data terseleksi sesuai dengan data yang dibutuhkan menghasilkan suatu kesimpulan sehingga dapat diketahui sejas-jelasnya mengenai kekurangan serta kelebihan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat.

1.6.9 Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 2. Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/(2018-2019)				
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Tahap Persiapan					
	a. Observasi Awal					
	b. Penyusunan dan Pengajuan Judul					
	c. Pengajuan Proposal					
	d. Perizinan Penelitian					
2.	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan Data					
	b. Analisis Data					
3.	Tahap Penyelesaian					
	a. Penyusunan Laporan					
	b. Pengajuan Sidang Munaqosah					



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG